UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590 +62 813 6511 8590 <https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i4>

Diterima: 03/06/2021, Diperbaiki: 20/06/2021, Diterbitkan: 03/07/2021

PENGUNAAN ANJING PELACAK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK SELATAN

**(Studi tentang Koordinasi antara Penyidik Polres Solok Selatan dengan Direktorat
Samapta Polda Sumatera Barat Dalam Penggunaan Anjing Pelacak)**

Randi Jumantri

Program Pasca Sarjana, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: randijumantri@gmail.com*Corresponding Author: Randi*

ABSTRACT

The first step in an investigation itself is to find items in a criminal case which are items indicated as evidence of a crime that was found left behind at the scene of the crime or abbreviated as TKP. In a crime case that resulted in the death of a person, the Animal Unit of the Samapta Bhayangkara Directorate of the West Sumatra Police was asked to provide assistance with sniffer dogs by the South Solok Police Criminal Investigation Unit regarding a serious case that resulted in the death of the victim that occurred in the Solok Police Legal Area. With Police Report No. Pol : LP/138/X/2018/Spkt–Pagu Police, 01 October 2018.

Keywords: *Tracking Dog, Not Criminal Offense, Investigator*

ABSTRAK

Langkah awal dalam sebuah penyidikan sendiri yaitu menemukan barang-barang dalam sebuah perkara tindak pidana yang merupakan barang bukti yang berindikasi sebagai bekas sebuah kejahatan yang ditemukan tertinggal di tempat kejadian perkara atau biasa disingkat TKP. Pada sebuah kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, Unit Satwa Direktorat Samapta Bhayangkara Polda Sumatera Barat pernah diminta bantuan menyediakan anjing pelacak oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan terkait tentang adanya kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Solok. Dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/138/X/2018/Spkt–Polsek Pagu, 01 Oktober 2018.

Kata Kunci: Anjing Pelacak, Tidak Pidana Penganiayaan, Penyidik

PENDAHULUAN

Berkembangnya tindakan pelaku kejahatan untuk menghilangkan benda-benda atau bukti yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga pelaku kejahatan dapat terbebas dari jeratan hukum. Menyikapi hal demikian perlu ketelitian dan kecermatan penyidik dalam mencari dan menemukan bukti-bukti apakah telah terjadi suatu tindak pidana pada suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memiliki kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang dalam menanganani laporan yang diduga peristiwa tindak pidana yaitu salah satunya penanganan pertama pada tempat kejadian perkara (Rengga Permana Prayudistari, 2015:3).

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Sedangkan Penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP.

Wewenang penyidik yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 yakni mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. Selaras dengan kewajiban hukum yang menghancurkan dilakukannya tindakan jabatannya; c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penyelidikan adalah sub sistem daripada penyidikan yang tujuannya tiada lain untuk mengumpulkan bahan-bahan yang nantinya akan dipergunakan pada tahap penyidikan, apabila ternyata suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang diselidiki itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan berdasarkan hasil penyelidikan itu bahwa terhadap tindak pidana yang diselidiki tersebut dapat dilakukan penyidikan (Harun M. Husain, 1991:55).

KUHAP mengatur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Selanjutnya pihak yang melakukan penyidikan diatur pula pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undnag untuk melakukan penyidikan”. Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan mentukan siapa pelakunya.

Dalam hal penyidikan, penyidik berkewajiban menentukan seseorang berstatus tersangka, penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan, selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana maka tindakan penyidik tersebut paling kurang

harus didasarkan pada bukti yang cukup. Upaya pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang merupakan sarana pembuktian itu berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan. Namun apabila penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan (HMA Kuffal, 2008:13-14).

Langkah awal dalam sebuah penyidikan sendiri yaitu menemukan barang-barang dalam sebuah perkara tindak pidana yang merupakan barang bukti yang berindikasi sebagai bekas sebuah kejahatan yang ditemukan tertinggal di tempat kejadian perkara atau biasa disingkat TKP. TKP adalah semua tempat kejadian peristiwa baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa yang menjadi urusan polisi.

Mengenai barang bukti KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut : 1) Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP); 2) Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang Ditangani; 3) Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU. Macam-macam alat bukti diatur dalam KUHAP Pasal 184, yaitu: 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk dan 5) Keterangan Terdakwa.

Dasar hukum terhadap alat bukti petunjuk terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d dan Pasal 188 KUHAP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, hal ini seperti apa yang tercantum dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

Menurut Andi Hamzah alat-alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari beberapa hal, antara lain: (Andi Hamzah, 2008:26) a) Surat-surat yang menguatkan tuduhan maupun yang meringankan terdakwa. Surat-surat dalam hal ini adalah segala bentuk tulisan yang berhubungan dengan kasus tersebut; b) Keterangan dari saksi ahli yang berkompeten terhadap bidang yang berhubungan terhadap kasus tersebut; dan c) Alat-alat lain yang digunakan dalam membantu penyidik dalam pengungkapan suatu kasus, contohnya penggunaan anjing pelacak dalam menemukan barang bukti yang tersembunyi.

Berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut maka akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara. Sedang menurut pendapat ahli pidana Wirjono Projodikoro (1962:23), alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang paling lemah. Penilaian atas penilaian

pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain. Syarat-syarat untuk dapat dijadiakannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah: a) Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi; b) Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi; dan c) Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Pada sebuah kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati, Unit Satwa Direktorat Samapta Bhayangkara Polda Sumatera Barat pernah diminta bantuan Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan terkait tentang adanya kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Solok. Dengan Laporan Polisi No. Pol : LP / 138 / X / 2018 / Spkt – Polsek Pagu, 01 Oktober 2018.

Penyidikan mengharuskan para penyidik untuk terjun langsung ke TKP. Dalam sebuah penyidikan kepolisian berhak dan mempunyai kewenangan menggunakan anjing pelacak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat 1 huruf l yang berbunyi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk *deskriptif kualitatif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Koordinasi Penyidik Satreskrim Polres Solok Selatan Dengan Direktorat Samapta Polda Sumbar Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Menggunakan Anjing Pelacak

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Para manajer membagi kerja kedalam fungsi-fungsi atau departemen-departemen khusus untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi perusahaan mereka. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas pengkomunikasian yang tepat, maka setiap individu akan dengan semangat dalam menyelesaikan tugasnya. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan, tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan- kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah(departemen-departemen atau bidang- bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Koordinasi juga usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas didalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan didalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha kearah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

Koordinasi pun dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai Aparatur Negara yang mempunyai tugas pokok dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh fungsi opsional kepolisian khususnya dan fungsi pembinaan pada umumnya termasuk Direktorat Sabhara Polda Sumbar sebagai fungsi opsional Kepolisian tingkat Polda.

Koordinasi penting didalam suatu organisasi, diantaranya:

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcoakan, dan kekembarannya idelaraskan dan atau kekosongan pekerjaan.
- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mnecapai tujuan.
- d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu organisasi harus membantu tercapainya tujuan organisasi; dan
- e. Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Koordinasi Satreskrim Polres Solok Selatan dengan Direktorat Samapta Polda Sumbar dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati dimulai dengan permintaan dari Kasat Reskrim AKP Mochammad Rosidi, S.H, S.I.K tentang adanya kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Solok Selatan kepada Direktur Sabhara Direktorat Samapta Polda Sumbar.

Setiap pelaksanaan tugas oleh kepolisian diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas guna sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang telah dilaksanakan guna dapat dilakukan langkah kebijakan oleh pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Laporan pelaksanaan tugas yang dibuat ini adalah tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Unit Satwa Direktorat Samapta Bhayangkara Polda Sumatera Barat dalam rangka pelacakan kasus Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di wilayah hukum Polres Solok Selatan.

Dasar dari adanya koordinasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Surat Telegram Kapolda Sumbar Nomor : ST/306/IV/2011 tanggal 6 April 2011 tentang Pemberdayaan Unit Satwa yang ada di Dit Sabhara Polda Sumbar.
- 3) Renja Dit Sabhara Polda Sumbar TA. 2018

Koordinasi ini sendiri dilakukan dalam membantu penyelidikan dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati di Wilayah Hukum Polres Solok Selatan. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Jadi penyelidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi suatu timbul persangkaan telah dilakukan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Menyadari kekurangan tersebut maka aparat penegak hukum tidaklah kekurangan akal. Dengan kemampuan yang dimiliki dan dengan segala upaya, aparat penegak hukum berusaha agar pelaku tindak pidana atau tersangkanya dapat diketemukan, sehubungan dengan hal tersebut maka aparat penegak hukum yang diberikan tugas dan wewenang melakukan tindakan penyelidikan dapat menggunakan anjing pelacak.

Berkaitan dengan tugas Sattama Satwa selaku penyidik dengan menggunakan bantuan anjing elacak maka tugas sokoknya adalah mengadakan bantuan taktis Satwa dibidang:

- 1) Penjagaan;
- 2) Pengawalan;
- 3) Patroli;
- 4) Pelacakan umum;
- 5) Pelacakan khusus;
- 6) Sar Darat;
- 7) Opdahura (Operasi Pengendalian Huru Hara).

Sedangkan mengenai wewenang dari Unit Satwa Direktorat Samapta Bhayangkara Polda Sumatera Barat adalah sama dengan wewenang penyidik pada umumnya seperti apa yang diatur dalam KUHAP:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan “Tindakan Lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan harus itu patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik;
- 5) Membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan pada penyidik.

Sifat dari koordinasi antara Satreskrim Polres Solok Selatan dengan Direktorat Samapta Polda Sumbar dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati:

- 1) Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
- 2) Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh menyeluruh. oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.
- 3) Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Koordinasi yang terjalin antara Satreskrim Polres Solok Selatan dengan Direktorat Samapta Polda Sumbar dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati, dimana koordinasi dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda satu sama lain. Koordinasi yang dilakukan pada intinya membantu penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan untuk menemukan bukti petunjuk, untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Bagaimanakah Penggunaan Anjing Pelacak Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya orang pada Satreskrim Polres Solok Selatan

Tujuan yang paling tepat dari pengkoordinasian ialah untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan kerja. Oleh karena itu, mengkoordinator segala kegiatan yang dilaksanakan bawahan dan menunjuk orang yang tepat dan sesuai. Jika koordinasi dilakukan dengan efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan.

Maka koordinasi selanjutnya, berdasarkan perintah lisan Direktur Sabhara dan perintah langsung dari Kasat Reskrim AKP Mochammad Rosidi, S.H, S.I.K tentang adanya kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Solok Selatan selanjutnya Direktur Sabhara memerintahkan Kanit Satwa Iptu Ardinof Hendri guna melaksanakan pelacakan di Wilayah Hukum Polres Solok Selatan. Setelah mendapat perintah Kanit Satwa menyiapkan 4 (empat) orang pawang guna berangkat menuju Wilayah Hukum Polres Solok Selatan pada pukul 15.00 WIB pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018.

Tujuan koordinasi dari pelacakan ini untuk menemukan bukti-bukti kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Solok Selatan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam koordinasi ini adalah:

- a. Barang bukti yang merupakan hasil kejahatan;
- b. Barang yang dipakai sebagai alat tindak kejahatan;
- c. Route atau jalan yang digunakan tersangka untuk keluar masuk TKP;

- d. Barang/Benda lain yang ada hubungannya dengan kejahatan (darah, ingus dan sebagainya yang mendukung pelacakan);
- e. Tempat yang pernah dipakai pelaku untuk suatu kegiatan sebelum / sesudah melakukan kejahatan.

Personil yang mengikuti pelacakan kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Solok Selatan, adalah:

- a. Pawang Satwa Dit Sabhara Polda Sumbar Brigadir Hamidi Ramadhoni Nrp. 85052149
- b. Pawang Satwa Dit Sabhara Polda Sumbar Bripda Gopal Satio Fardumi Nrp. 94081221
- c. Pawang Satwa Dit Sabhara Polda Sumbar Bripda Ridho Al amin Akbar Nrp. 95090947
- d. Pawang Satwa Dit Sabhara Polda Sumbar Bripda Novan P Zebua Nrp. 97110072

Sedangkan satwa yang terlibat adalah sebagai berikut:

- a. Nama : Pido
Ras : Malanois
Kualifikasi : Pelacak Umum
- b. Nama : Velis Von Orchid
Ras : AGJ
Kualifikasi : Pelacak Umum

Setelah melaksanakan perjalanan kurang lebih dari 3jam Unit Satwa sampai di Wilayah Hukum Polres Solok Selatan pada pukul 17.00 WIB. Berdasarkan perintah Kasat Reskrim AKP Mochammad Rosidi, S,H, S.I.K pukul 18.00 WIB Unit Satwa berangkat ke TKP Jorong Mudik Lolo, Nagari Sako Pasia Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Setelah sampai di TKP dan mencari informasi dari anggota Reskrim Polres Solok Selatan.

Berdasarkan informasi kejadian perkara terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober pukul 22.00 WIB dimana terduga mantan suami korban atas nama Muhammad Budi 23 Tahun Suku Melayu Pekerjaan Tani Alamat Jorong Lasyang Batu Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. Terduga melarikan diri yang diperkirakan lari ke perbukitan yang berada di belakang rumah terduga.

Setelah mendapat informasi Unit Satwa melaksanakan pelacakan guna melacak keberadaan terduga Muhammad Budi dengan menggunakan titik tolak sebuah baju yang tertinggal di TKP. Pelacakan dimulai ditempat dimana terduga terakhir ditemukan warga dengan menggunakan Satwa PIDO. Setelah diciumkan titik tolak, Satwa mengarah kepada sebuah sungai yang ada di TKP dan diperkirakan terduga masih ada di TKP tersebut dan dimana satwa kehilangan jejak pelaku.

Berdasarkan perintah Kasat Reskrim AKP Mochammad Rosidi, S,H, S.I.K maka seluruh anggota Reskrim Solok Selatan menyisir tempat dimana Satwa Kehilangan jejak, setelah beberapa jam melakukan penyisiran dan akhirnya terduga menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Polres Solok Selatan. Pada 23.00 WIB Unit Satwa kembali ke Mako sampai pada pukul 05.00 WIB dalam keadaan aman dan terkendali.

Hasil yang dicapai Unit Satwa Direktorat Samapta Bhayangkara Polda Sumatera Barat dalam rangka pelacakan kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia

di wilayah hukum Polres Solok Selatan adalah ditemukannya petunjuk untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Saran yang bisa disampaikan oleh Unit Satwa Direktorat Samapta Bhayangkara Polda Sumatera Barat adalah menyampaikan kepada pimpinan agar selalu mengikutsertakan unit satwa dalam hal pelacakan dan pengamanan yang ada di Wilayah Hukum Polda Sumbar.

Di dalam pengungkapan suatu tindak pidana seperti yang termuat dalam contoh kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Solok Selatan dapat kita lihat bahwa peran serta anjing pelacak sangatlah penting, tapi di dalam pelaksanaannya peran serta anjing pelacak ini hanya sebagai pembantu atau hanya sebagai batuan teknis saja bagi penyidik dalam olah TKP sehingga dapat di ketahui tentang bukti-bukti yang mendukung kejahatan tersebut.

Berdasarkan bau keringat yang ditinggalkan oleh tersangka maka anjing pelacak mengikuti kemana arahnya. Ternyata hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anjing pelacak cocok dengan keterangan yang didapat dari para saksi yang mengarahkan tuduhan kepada tersangka.

Hewan tersebut melakukan pelacakan dengan benar di karenakan hewan pelacak sudah di latih untuk melakukan pelacakan bau, baik bau manusia maupun barang-barang yang di tujukan kepadanya , hewan tersebut sesuai dengan jalur/ arahnya di mencari di buktikan dengan di temukan baju milik terduga tersangka dan ketika di tanyakan kepada terduga tersangka, dimana terduga mengakui itu bawasanya baju miliknya yang di lepas untuk melarikan diri.

Biasanya anjing pelacak digunakan pada awal-awal penyidikan yaitu pada saat olah tempat kejadian perkara oleh penyidik, karena anjing pelacak ini yang digunakan adalah indera penciumannya maka biasanya anjing pelacak ini digunakan tidak boleh lebih dari satu hari dari kegiatan awal olah tempat kejadian perkara oleh penyidik.

Kekuatan pembuktian terhadap alat bukti yang ditemukan oleh anjing pelacak selama ini hanya sebagai alat bukti petunjuk, yang dalam hal ini berfungsi sebagai penambah keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Penyidik menggunakan anjing pelacak biasanya dalam kasus-kasus seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian.

Di depan persidangan apabila hakim menghendaki maka untuk menambah keyakinan hakim dalam memutuskan perkara maka dapat dihadirkan sang pawang dari anjing untuk memberikan keterangan di muka persidangan, tetapi bukan sebagai saksi ahli melainkan hanya memaparkan tentang apa yang ditemukan oleh anjing pelacak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat dimengerti bahwa dalam proses penyidikan kekuatan pembuktian terhadap alat bukti yang ditemukan oleh anjing pelacak di muka pengadilan hanyalah sebagai petunjuk pembantu yang penemuannya dibantu oleh anjing pelacak.

Keterangan sang pawang anjing dimuka persidangan adalah bukan sebagai keterangan saksi ahli melainkan hanya sebagai bahan untuk menambah keyakinan hakim saja dalam memutuskan suatu perkara. Karena dalam hal ini anjinglah yang menemukan alat bukti tersebut dan sang pawang hanya berperan sebagai penerjemah di muka pengadilan terhadap alat bukti yang ditemukan oleh anjing pelacak tersebut.

Dalam proses penyidikan peran serta anjing pelacak hanyalah sebagai bantuan teknis bagi penyidik untuk membantu lancarnya proses penyidikan sehingga seringkali penggunaan anjing pelacak ini tidak tercatat dalam berita acara pemeriksaanyang dibuat oleh pihak penyidik.

Sedangkan kehadiran pawang dipengadilan hanya akan dilaksanakan apabila hakim belum merasa yakin dan menghendaki agar pawang anjing pelacak tersebut dihadirkan di hadapan hakim untuk memberikan kesaksiannya berkaitan dengan hasil penelusuran atau hasil barang bukti yang diketemukan oleh anjing tersebut.

Dari hasil penelitian penulis dihadapkannya pawang anjing pelacak tersebut di hadapan pengadilan belum pernah dilakukan di wilayah Polda Sumatera Barat.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini, yaitu:

1. Bentuk Koordinasi Penyidik Satreskrim Polres Solok Selatan Dengan Direktorat Samapta Polda Sumbar Dalam Pengungkapan Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati Menggunakan Anjing Pelacak adalah dimulai dengan permintaan dari Kasat Reskrim AKP Mochammad Rosidi, S.H, S.I.K tentang adanya kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Solok Selatan kepada Direktur Sabhara Direktorat Samapta Polda Sumbar. Koordinasi dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda satu sama lain. Koordinasi yang dilakukan pada intinya membantu penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan untuk menemukan bukti petunjuk, untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.
2. Penggunaan anjing pelacak dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati di Satreskrim Polres Solok Selatan adalah melaksanakan pelacakan di Wilayah Hukum Polres Solok Selatan. Setelah mendapat perintah Kanit Satwa menyiapkan 4 (empat) orang pawang guna berangkat menuju Wilayah Hukum Polres Solok Selatan pada pukul 15.00 WIB pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018. Hasil yang dicapai Unit Satwa Direktorat Samapta Bhayangkara Polda Sumatera Barat dalam rangka pelacakan kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Solok Selatan adalah ditemukannya petunjuk untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Harun M. Husain, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008
- Rengga Permana Prayudistari, *Upaya Penyelidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Hukum, Edisi Februari, 2015
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Sumur, 1962

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang **Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pelacakan Kasus Penganiayaan Berat Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Diwilayah Hukum Polres Solok Selatan, Unit Satwa Direktorat Samapta Bhayangkara Polda Sumatera Barat, Padang, 2018.

Rengga Permana Prayudistari, *Upaya Penyelidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Hukum, Edisi Februari, 2015.

Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun XXVI No. 309*, Citra Umbara, Jakarta, 2011.